

BAB I

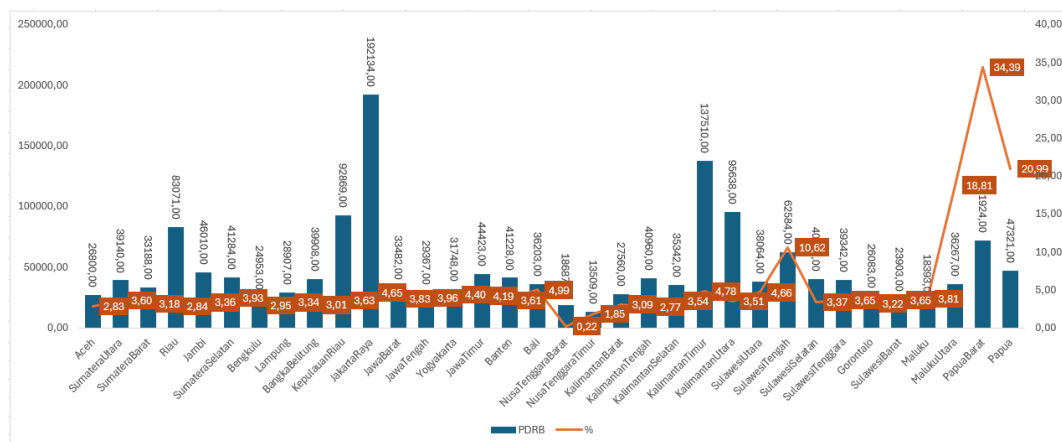
LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu proses yang menyebabkan pendapatan total dan pendapatan perkapita suatu masyarakat terus menerus bertambah dalam jangka panjang (Sukirno, 2002). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan baik antar penduduk, antar daerah maupun antar sektor. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pendapatan nasional, namun juga memperhitungkan masalah lain seperti perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, ketimpangan pendapatan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar individu dengan mencapai suatu peningkatan keadaan hidup melalui peningkatan standar hidup masyarakat yang tidak hanya dinilai dari sisi material saja (Todaro dan Smith, 2006).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan tersebut adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang mencerminkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Todaro & Smith, 2020).

Upaya Indonesia untuk bertransformasi menjadi ekonomi maju pada tahun 2045 kini berada pada titik persimpangan yang krusial. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan besar yang dikenal sebagai Middle Income Trap (MIT), sebuah kondisi di mana negara berpendapatan menengah kehilangan momentum pertumbuhan sebelum mencapai status negara maju. Stagnasi ini sering kali terjadi karena hilangnya keunggulan kompetitif di sektor upah murah, namun belum cukup kompetitif dalam inovasi dan teknologi tinggi (Eichengreen, Park, & Shin, 2013). Oleh karena itu, memahami dinamika PDRB per kapita di tingkat regional menjadi sangat vital untuk melihat seberapa jauh Indonesia telah melangkah keluar dari jebakan tersebut.



Gambar 1. 1 PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita di 34 Provinsi Tahun 2023

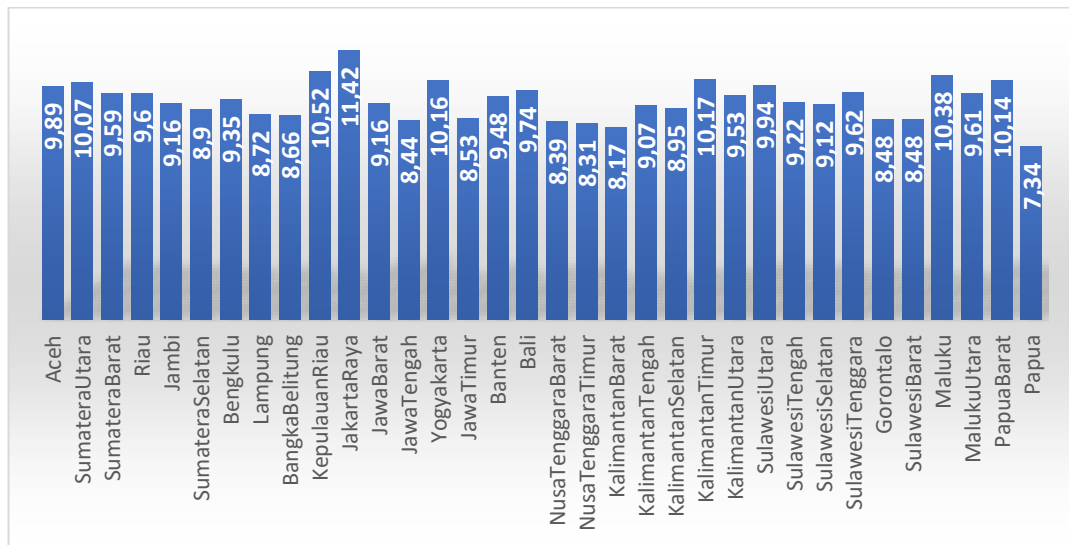
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok antarprovinsi di Indonesia, dimana DKI Jakarta (Jakarta Raya) mendominasi dengan nilai PDRB tertinggi mencapai 192.134,00, disusul oleh

wilayah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau. Meskipun Jakarta memimpin secara nominal, anomali pertumbuhan yang sangat signifikan justru terjadi di Papua Barat dengan lonjakan persentase sebesar 34,39%, jauh melampaui rata-rata provinsi lainnya. Sebaliknya, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan angka persentase terendah di angka 0,22%, yang menunjukkan adanya tantangan pertumbuhan ekonomi yang kontras di wilayah Indonesia Timur. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun pusat akumulasi nilai ekonomi masih terpusat di Jawa dan daerah industri, dinamika akselerasi pertumbuhan tercepat saat ini sedang bergeser ke arah Papua Barat.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keragaman karakteristik geografis dan sumber daya, menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal daerah tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi daerah tetangganya. Hal ini sesuai dengan Hukum Pertama Geografi Tobler yang menyatakan bahwa segala sesuatu berhubungan dengan segala sesuatu lainnya, tetapi sesuatu yang dekat lebih berpengaruh daripada sesuatu yang jauh (Anselin, 1988).

Ketimpangan PDRB di berbagai daerah sering kali berakar pada perbedaan kualitas modal manusia. Sebagai komponen fundamental pembangunan, modal manusia tidak hanya mencakup dimensi kesehatan tetapi juga kapasitas intelektual yang dibangun melalui pendidikan. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator objektif untuk memotret akumulasi pengetahuan yang dimiliki oleh penduduk di suatu wilayah (Alexander, Nuryadin, & Suharsih, 2022). Bukti empiris dari Rianto (2014) menunjukkan bahwa variabel RLS berpengaruh besar terhadap peningkatan PDRB per kapita.



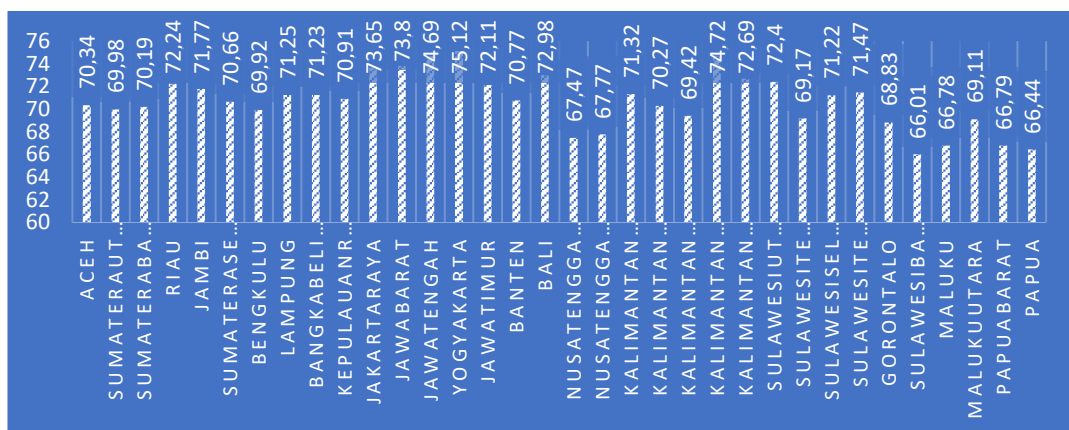
Gambar 1. 2 Rata-Rata Lama Sekolah di 34 Provinsi Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Visualisasi data diatas menunjukkan distribusi capaian indikator makro antarprovinsi di Indonesia yang memiliki keragaman nilai yang cukup signifikan, dengan Jakarta Raya menempati posisi puncak pada angka 11,42. Meskipun mayoritas wilayah berada pada rentang angka 8 hingga 10, terdapat disparitas capaian yang terlihat melalui angka terendah di Papua sebesar 7,34, disusul oleh Kalimantan Barat pada angka 8,17. Tren ini mengindikasikan bahwa konsentrasi capaian tertinggi masih didominasi oleh wilayah pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah kepulauan strategis seperti Kepulauan Riau (10,52) dan Maluku (10,38). Secara analitis, sebaran data ini merefleksikan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut guna mendorong konvergensi capaian yang lebih merata di seluruh nusantara.

Selain dimensi pendidikan, derajat kesehatan masyarakat merupakan pilar krusial dalam pembangunan modal manusia. Chairunnisa dan Qintharah (2022)

menegaskan bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator fundamental yang merefleksikan kualitas kesehatan suatu populasi. Tingkat kesehatan yang optimal terbukti memiliki korelasi signifikan terhadap peningkatan PDRB per kapita, mengingat kondisi fisik yang prima merupakan prasyarat mutlak bagi produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, Kusuma Nigrum (2023) menjelaskan bahwa peningkatan UHH memberikan kesempatan bagi individu untuk memiliki masa produktif yang lebih panjang. Umur harapan hidup yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih lama dalam aktivitas ekonomi, yang secara agregat mendorong peningkatan pendapatan dan memicu ekspansi ekonomi wilayah secara sistematis.



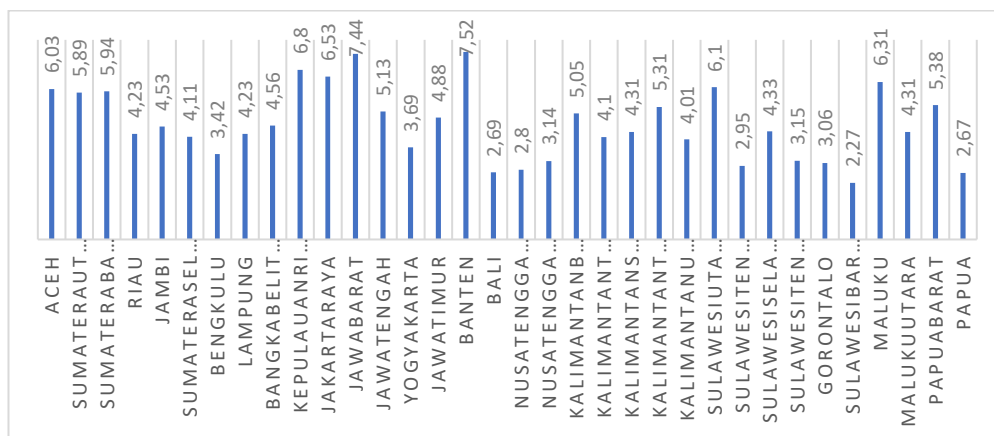
Gambar 1. 3 Umur Harapan Hidup di 34 Provinsi Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas, Angka Harapan Hidup (AHH) di berbagai provinsi Indonesia menunjukkan sebaran nilai yang mencerminkan variasi kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial antarwilayah. Secara umum, rata-rata nasional berada pada rentang 66 hingga 75 tahun, Provinsi Yogyakarta mencatatkan Angka Harapan Hidup tertinggi di Indonesia dengan nilai 75,12

tahun, disusul oleh Kalimantan Timur (74,72 tahun) dan Jawa Tengah (74,69 tahun). Sebagai pusat pertumbuhan, Jakarta Raya memiliki AHH yang cukup kompetitif di angka 73,65 tahun, menunjukkan akses layanan kesehatan yang memadai di wilayah ibu kota. Terdapat disparitas yang cukup tajam saat meninjau wilayah timur, di mana Provinsi Papua mencatatkan angka terendah sebesar 66,44 tahun, diikuti oleh Sulawesi Barat (66,01 tahun) dan Maluku Utara (66,78 tahun).

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi hambatan struktural yang signifikan dalam meningkatkan output daerah. Berdasarkan Hukum Okun, peningkatan pengangguran berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2019). TPT yang tinggi tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat secara agregat, tetapi juga mencerminkan inefisiensi pasar kerja yang dapat menghambat peningkatan PDRB per kapita (Putra & Sudibia, 2020). Masalah pengangguran di suatu provinsi bahkan dapat memberikan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi wilayah sekitarnya melalui migrasi tenaga kerja yang tidak terserap.

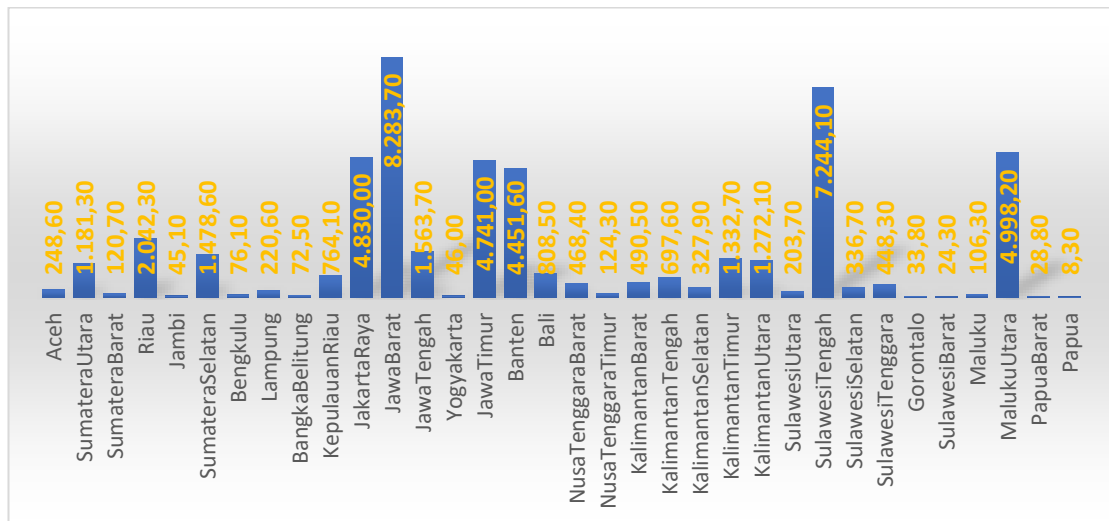


Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka di 34 Provinsi Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di berbagai provinsi Indonesia menunjukkan sebaran nilai yang fluktuatif dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah penyangga ibu kota dan pusat industri, di mana Banten memiliki angka tertinggi sebesar 7,52%, disusul oleh Jawa Barat dengan 7,44%. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi cenderung menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah luar Jawa yang memiliki basis ekonomi berbeda. Sebaliknya, performa pasar tenaga kerja yang lebih optimal terlihat di wilayah timur dan tengah, dengan Sulawesi Barat mencatatkan angka pengangguran terendah sebesar 2,27%, diikuti oleh Papua pada angka 2,67% dan Bali sebesar 2,69%. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan adanya disparitas struktural ketenagakerjaan yang signifikan, di mana wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di bagian barat Indonesia justru memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya yang kemungkinan didominasi oleh sektor informal atau industri primer.

Akselerasi menuju negara berpendapatan tinggi sangat bergantung pada masuknya Foreign Direct Investment (FDI). Investasi asing bukan hanya sekedar injeksi modal, melainkan saluran transfer teknologi dan praktik manajerial internasional yang krusial bagi modernisasi industri di daerah. FDI diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan nilai tambah produksi lokal. Namun, efektivitas FDI dalam memicu pertumbuhan PDRB per kapita sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas serap tenaga kerja di masing-masing provinsi.



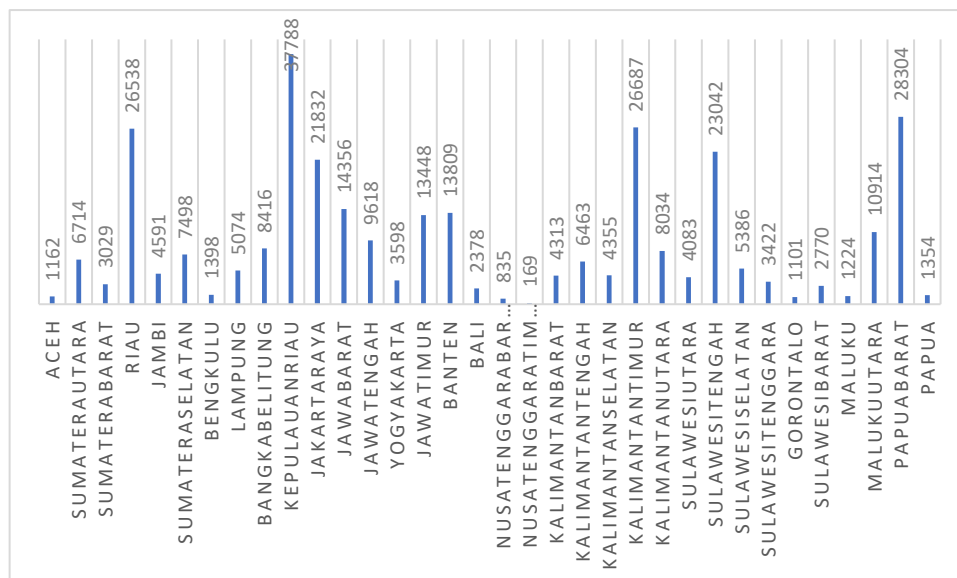
Gambar 1. 5 Penanaman Modal Asing di 34 Provinsi Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan konsentrasi yang sangat kuat pada wilayah-wilayah dengan basis industri manufaktur dan pertambangan yang masif. Jawa Barat menduduki posisi puncak sebagai destinasi utama investasi asing dengan nilai mencapai 8.283,70, yang mencerminkan dominasi infrastruktur industri di wilayah penyangga ibu kota tersebut. Selain Jawa Barat, wilayah dengan kekayaan sumber daya alam juga menarik modal asing dalam jumlah besar, seperti terlihat pada Sulawesi Tengah dengan nilai 7.244,10 dan Maluku Utara sebesar 4.998,20, yang kemungkinan besar didorong oleh sektor hilirisasi pertambangan. Sementara itu, wilayah perkotaan seperti Jakarta Raya tetap menjadi magnet investasi yang signifikan dengan nilai 4.830,00, disusul oleh pusat industri lain seperti Jawa Timur (4.741,00) dan Banten (4.451,60). Secara keseluruhan, narasi data ini menggambarkan adanya pola investasi yang terpusat di koridor industri pulau Jawa serta daerah-daerah strategis berbasis komoditas di

wilayah Indonesia Timur, sedangkan wilayah lainnya seperti Papua (8,30) dan Sulawesi Barat (24,30) masih mencatatkan angka PMA yang sangat minimal.

Sektor manufaktur memegang peranan vital sebagai "mesin pertumbuhan" yang mampu menggerakkan ekonomi secara masif. Indonesia menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, di mana kontribusi manufaktur cenderung stagnan sebelum mencapai kemakmuran maksimal (Rodrik, 2016). Padahal, penguatan sektor industri pengolahan di tingkat provinsi merupakan strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk domestik dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lainnya. Tanpa basis manufaktur yang kuat dan terintegrasi, target pencapaian PDRB per kapita tinggi akan sulit tercapai.



Gambar 1. 6 Nilai Tambah Manufaktur di 34 Provinsi Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Terlihat dominasi yang sangat kuat dari wilayah-wilayah pusat industri dan daerah kaya sumber daya strategis. Kepulauan Riau memiliki angka tertinggi mencapai 37.788, disusul oleh pusat pertumbuhan di wilayah timur yakni Papua

Barat sebesar 28.304 dan Kalimantan Timur sebesar 26.687. Di Pulau Jawa, konsentrasi nilai tambah manufaktur yang signifikan berada di Jakarta Raya (21.832), Jawa Barat (14.356), dan Banten (13.809), yang mengindikasikan matangnya ekosistem industri di wilayah tersebut. Sebaliknya, kesenjangan nilai yang mencolok terlihat di beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur yang hanya memiliki angka 169, serta wilayah lain seperti Aceh (1.162) dan Papua (1.354) yang memiliki basis manufaktur jauh lebih rendah. Secara keseluruhan, narasi data ini menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur bernilai tinggi masih terkonsentrasi di pusat pemerintahan serta wilayah yang berhasil melakukan hilirisasi sumber daya alam secara masif.

Mengacu pada prinsip dasar geografi, setiap wilayah memiliki interdependensi di mana entitas yang berdekatan secara spasial cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan wilayah yang berjauhan (Putudkk., 2018). Hal ini diperkuat oleh temuan Yunitasari & Firdaus (2022) yang menunjukkan adanya kemiripan nilai PDB per kapita pada provinsi-provinsi yang bertetangga sebagai bentuk nyata dari efek ketergantungan spasial. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi berbagai determinan PDB per kapita dengan mengintegrasikan interaksi antarwilayah melalui pendekatan regresi data panel spasial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terjadi keterkaitan spasial PDRB perkapita antar Provinsi di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh spasial pada variable RLS, UHH,TPT, FDI dan MVA terhadap PDRB perkapita antar provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis keterkaitan spasial PDRB perkapita antar provinsi di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh spasial pada variable RLS, UHH,TPT, FDI dan MVA terhadap PDRB perkapita antar provinsi di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1 Pengembangan Ilmu Ekonomi Regional: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya dalam mengintegrasikan fenomena middle income trap dengan model ekonometrika spasial.
- 2 Referensi Akademis: Memberikan literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dinamika spasial dan transformasi ekonomi di negara berkembang menggunakan data panel spasial.
- 3 Validasi Model: Menguji efektivitas penggunaan model regresi spasial dibandingkan model ekonometrika klasik dalam menjelaskan fenomena ketimpangan pendapatan antar-daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Pusat (Bappenas/Kementerian Terkait): Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi nasional "Indonesia Emas 2045",

khususnya dalam mengidentifikasi provinsi mana yang memerlukan intervensi khusus agar tidak terjebak dalam stagnasi pendapatan.

2. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan masukan strategis mengenai pentingnya kolaborasi antar-wilayah (kerja sama antardaerah). Pemda dapat memahami bahwa kebijakan di wilayahnya tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memengaruhi atau dipengaruhi oleh wilayah tetangga, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan investasi dan pendidikan.
3. Penguatan Sektor Riil: Memberikan dasar pengambilan kebijakan terkait optimalisasi sektor manufaktur dan daya tarik investasi asing (FDI) yang berbasis pada karakteristik spasial masing-masing provinsi.